



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 merupakan masa transisi pemerintahan dengan prioritas pembangunan yang mengacu pada 9 bidang pembangunan RPJPN Tahun 2005 - 2025. Adapun pokok-pokok kebijakan dalam RKP Tahun 2015 antara lain :

1. Pagu anggaran konservatif dan dibagi dalam BA-KL, BA-non KL, BA-BUN dan DAK;
2. Pembiayaan, bahwa pagu pinjaman proyek luar negeri juga konservatif dan fokus pada percepatan anggaran;
3. Kebijakan transfer daerah, yaitu :
 - Pengalihan Dekon TP ke DAK
 - Hibah ke daerah
 - Dana Desa

Arah kebijakan belanja Kementerian / Lembaga (K/L) tahun 2015, meliputi :

1. Kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan perundangan yaitu anggaran pendidikan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pelayanan dasar (air minum, sanitasi, perumahan), IPTEK yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN;
2. Kegiatan berlanjut seperti kegiatan MP3EI dan MEF;
3. Isu khusus yaitu kegiatan penanggulangan kemiskinan (PKH);
4. Pendanaan isu strategis tahun 2015 terdiri dari isu strategis yang diamanatkan dan isu strategis yang tidak diamanatkan peraturan perundangan;
5. Review kegiatan yang telah selesai, direview pada saat baseline;



6. Review terhadap belanja sosial, terutama diarahkan pada penanggulangan bencana, Kementerian Sosial dan Kementerian yang mendukung fungsi pendidikan.

Pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, kebijakan umum yang ditempuh dalam rangka mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan antara lain :

1. Penguatan pilar dan fundamntasi sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan bahan baku lokal;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan didorong oleh industri kecil dan menengah serta koperasi yang handal;
3. Peningkatan produksi dan perluasan jaringan pemasaran dalam rangka peningkatan daya saing;
4. Pengembangan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar;
5. Pengembangan industri kecil dan menengah.

Sebagaimana termuat dalam Peraturan daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lamandau tercermin pada misi ke 1 "Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera" dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan meningkatkan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lamandau antara lain :

1. Meningkatkan produktifitas komoditi;
2. Meningkatkan produktifitas pangan;
3. Mengembangkan kelembagaan permodalan;
4. Mempermudah layanan perizinan investasi;
5. Mengembangkan tempat pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja.



3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu 2009-2012, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB ADHB tercatat sebesar 950,57 milyar rupiah dan pada tahun 2011 mencapai 1,39 trilyun rupiah. Artinya, PDRB ADHB Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan sebesar 455,52 milyar rupiah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Kontribusi terbesar PDRB ADHB Kabupaten Lamandau tahun 2009-2012 adalah dari sektor pertanian.

Demikian halnya dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama kurun waktu 2009-2012 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB riil tercatat sebesar 556,49 milyar rupiah kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 672,59 milyar rupiah sehingga selama periode tersebut secara riil PDRB ADHK Kabupaten Lamandau naik sebesar 116,09 milyar rupiah. Peningkatan nilai PDRB terjadi di semua sektor. Namun, kontribusi terbesar PDRB ADHK Kabupaten Lamandau tahun 2009-2012 masih dari sektor pertanian.

Jika dilihat dari persentase perkembangannya, PDRB ADHB Kabupaten Lamandau dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan dan penurunan, tahun 2009 sebesar 8,30%, meningkat pada tahun 2010 menjadi 15,13%, kemudian berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 13,78% dan 13,31%. Sementara itu, PDRB ADHK justru mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 5,74% pada tahun 2009 menjadi 6,88% pada tahun 2012.

Berdasarkan 9 (sembilan) sektor ekonomi pembentuk PDRB, terdapat 6 (enam) sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan di atas total pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau pada akhir tahun 2012. Keenam sektor tersebut adalah pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, dan sektor jasa. Sedangkan tiga sektor lainnya berada di bawah pertumbuhan total PDRB, yaitu sektor listrik, gas & air bersih, sektor perdagangan, hotel, & restoran, dan sektor pengangkutan & komunikasi.

Struktur Perekonomian

Terdapat 3 (tiga) sektor yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Lamandau tahun 2012 adalah Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, dan Sektor Jasa-jasa. Dari ketiga sektor, sektor Pertanian



memiliki kontribusi terbesar, yaitu 67,88 persen, dengan Subsektor Perkebunan menjadi penyumbang terbesar pada sektor Pertanian.

Besarnya sumbangan dari sektor Pertanian terhadap PDRB Lamandau menunjukkan perekonomian Lamandau masih tergantung pada sumber daya alam. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan total PDRB Lamandau atas dasar harga berlaku dibanding dengan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian dari tahun 2008-2012 menjadi sektor yang memiliki kontribusi terbesar dan mengalami fluktuasi bervariasi, hal ini dikarenakan meningkatnya peran dari kelompok sektor tersier dan sekunder.

Perkembangan peran Sektor Pertanian di Kabupaten Lamandau yaitu sebagai berikut: tahun 2008 kontribusinya mencapai 67,63 persen, tahun 2009 67,52 persen, tahun 2010 kontribusinya mencapai 67,53 persen, tahun 2011 kontribusinya mencapai 68,05, dan tahun 2012 kontribusinya mencapai 67,88 dari total PDRB.

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Lamandau, yaitu sebesar 14,77 persen setelah tahun sebelumnya memberikan kontribusi hingga 14,72 persen. Peranan sektor ini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cukup bervariasi.

Sektor Jasa-jasa merupakan sektor ketiga terbesar dalam struktur perekonomian Lamandau. Kontribusi sektor ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tahun 2008 kontribusinya sebesar 8,10 persen, 8,34 persen pada tahun 2009, 8,52 persen pada tahun 2010, dan 8,96 persen pada tahun 2011. Sedangkan di tahun 2012, kontribusinya sedikit menurun, yaitu sebesar 8,91 persen. Menurunnya kontribusi sektor Jasa-jasa ini tidak berarti bahwa yang dibentuk oleh sektor ini menurun, tetapi lebih disebabkan karena meningkatnya kontribusi pada sektor-sektor lainnya.

Kontribusi keempat terhadap PDRB tahun 2012 ditempati oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 3,38 persen. Kontribusi di sektor ini selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, yaitu di tahun 2009 dari 3,82 persen menjadi 3,53 persen di tahun 2010. Di tahun 2011 turun kembali menjadi 3,42 persen. Meskipun demikian prospek sektor ini ke depannya diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik meskipun peningkatannya tidak sebesar sektor lain. Sektor ini sangat



dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat ataupun dunia usaha. Penurunan persentase kontribusi juga dipengaruhi oleh substitusi masyarakat dalam penggunaan angkutan sungai menjadi angkutan jalan raya.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan menempati posisi kelima terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamandau. Kontribusi sektor ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Posisi keenam ditempati oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 1,38 persen.

Sektor-sektor tersebut di atas menempati kontribusi pada urutan pertama sampai dengan keenam yang merupakan sektor- sektor yang sangat besar mempengaruhi naik turunnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2012 secara riil. Tiga sektor lainnya yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2012 yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 0,65 persen; Sektor Bangunan dengan kontribusi 0,27 persen. Selanjutnya pada urutan terakhir masih ditempati oleh Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan kontribusi sebesar 0,13 persen. Walaupun ketiga sektor ini masih kecil pengaruhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau secara keseluruhan saat ini pertumbuhan yang cukup pesat pada sektor ini menjanjikan peningkatan kontribusi ekonomi yang berperan besar dalam memajukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Lamandau.

PDRB per Kapita

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan positif akibat pengaruh pertumbuhan penduduk pada tahun bersangkutan. PDRB Perkapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Lamandau.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lamandau baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK selama tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, nilai PDRB ADHB per kapita tercatat sebesar 14,79 juta rupiah kemudian naik mencapai 21,27 juta rupiah pada tahun 2012. Sementara itu, PDRB ADHK per kapita pada tahun 2008 sebesar 8,96 juta rupiah naik menjadi 10,25 juta rupiah pada tahun 2011.



3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Lamandau tahun 2011 – 2012, maka proyeksi perekonomian Kabupaten Lamandau tahun 2015 dan 2016 serta untuk tahun - tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif. Gambaran ekonomi Kabupaten Lamandau diatas sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu untuk tahun 2015 mendatang, lingkungan eksternal dan internal akan tetap berpengaruh bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Lamandau. Pada lingkungan eksternal adalah keberpihakan ekonomi nasional terhadap kebijakan daerah. Sedangkan pada lingkungan internal masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur di daerah dan kuantitas serta kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah.

Dengan melihat kondisi yang telah dicapai pada tahun 2013 dan perkembangan yang terjadi serta permasalahan pada tahun 2014 maka tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Lamandau pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Lamandau masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah - langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup :

- a. Mendorong dan menjaga stabilitas perekonomian daerah, dengan upaya meningkatkan investasi daerah, penciptaan wirausaha-wirausaha baru, pengembangan industri berbasis pertanian, menyiapkan dana bagi kredit modal kerja bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan dengan tetap melaksanakan program-program pola pemberdayaan dan program pengembangan kapasitas SDM bagi masyarakat;
- c. Meningkatkan program pelayanan dasar bagi masyarakat terutama bidang pendidikan dan kesehatan;
- d. Peningkatan infrastruktur perdesaan terutama desa-desa tertinggal;



Prospek

Dengan keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah maka berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 dan 2015 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :

- a. Menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif;
- b. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha;
- c. Menyediakan infrastruktur menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi;
- e. Memperbaiki etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja;
- f. Efisiensi alokasi sumber dana dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, maka prospek perekonomian pada tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan akan terus menguat, setelah tahun 2013 kinerja sektor ekonomi semakin membaik;
- b. Perekonomian diharapkan mampu tumbuh 7,14 % pada tahun 2015;
- c. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 ditargetkan 2,25 % dan persentase penduduk miskin pada tahun 2015 menjadi 4,04 %.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2015, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu



berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Pemerintah Kabupaten Lamandau menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.



Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah,
- 3) Dana Cadangan Daerah (DCD), dan
- 4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Selain dana dari penerimaan tersebut, daerah juga menerima dana yang bersumber dari berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Rencana atau target pendapatan daerah pada tahun 2015 berdasarkan pada realisasi 2 (dua) tahun terakhir dan proyeksi tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 18.861.728.999,50 diperoleh dari pos pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp. 7.638.024.999,50 pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 7.223.704.000,-
- Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 541.357.964.000,25 diperoleh dari pos dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 60.376.974.000,- pos DAU sebesar Rp. 442.980.990.000,25 pos DAK sebesar Rp. 38.000.000.000,-
- Lain-Lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp.32.639.000.000,- diperoleh dari pos bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 16.139.000.000,- dan dari pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 11.250.000.000,- pos lain-lain pendapatan sebesar Rp. 5.250.000.000,-.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagaimana hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian



daerah, dan setelah dilakukan dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.1. halaman III-14.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (sustainability publik service) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melakukan berbagai upaya berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah meliputi:

- a). Penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pendataan potensi pajak/retribusi daerah serta meningkatkan pemungutan pajak/retribusi daerah.
- b) Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah, menyiapkan sarana untuk pemasangan iklan, pekan panutan pembayaran PBB, pemberian penghargaan bagi petugas pemungut yang berprestasi, penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- c). Meningkatkan koordinasi dengan para pengusaha serta memberi kesempatan kepada pengusaha berpartisipasi dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan khususnya bagi yang telah memenuhi kewajiban pajak/retribusi.
- d). Mengutamakan produksi lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan memenuhi kewajiban pajak/retribusi.
- e). Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran membayar pajak/retribusi.



- f). Melakukan pendataan ulang terhadap aset atau kekayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah serta mengoptimalkan penggunaannya dalam memaksimalkan pendapatan daerah.
- g). Mengintensifkan dan mengevaluasi semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memfungsikan tupoksi masing-masing Dinas/Badan sampai ketingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- i). Meningkatkan koordinasi, konsultasi maupun rekonsiliasi khususnya bagi pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi, sehingga diharapkan realisasi pendapatan tersebut dapat terlaksana secara transparan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak



- daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD.
 - e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
 - f. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
 - g. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
 - h. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2015, Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun target belanja belanja daerah pada tahun 2015 di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut (rekapitulasi dapat dilihat pada tabel 3.2 halaman III-15):

- Total belanja daerah sebesar Rp. 618.078.820.000,45,-
- Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 239.191.849.999,95
- Belanja Langsung yaitu pos program dan kegiatan, sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD direncanakan sebesar Rp. 378.886.970.000,45



3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2015 sebesar Rp. 89.228.760.000,- dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM. Pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau tahun 2015 diproyeksikan berasal dari Pembentukan Dana Cadangan untuk kegiatan Pesparawi Tingkat Provinsi 2017 di Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (rekapitulasi dapat dilihat pada tabel 3.3. halaman III-17).

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2015 di Kabupaten Lamandau diarahkan untuk :

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya dana cadangan bencana alam;
- c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.



**TABEL 3.1 REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012-2016**

No.	JENIS PENDAPATAN DAERAH	REALISASI (Rp)		PROYEKSI (Rp)		
		TAHUN	TAHUN	TAHUN BERJALAN	PAGU INDIKATIF	
		2012	2013		2014	TAHUN 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	14.281.301.001,23	18.448.358.089,75	17.715.466.304,00	18.861.728.999,50	20.257.432.750,43
1.1.1	Pajak Daerah	2.031.998.156,00	2.834.448.019,00	2.699.131.250,00	3.103.999.999,50	3.569.600.000,43
1.1.2	Retribusi Daerah	3.179.686.494,50	3.831.669.169,00	4.831.449.570,00	4.534.025.000,00	5.214.128.750,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.143.244.375,99	3.034.692.521,26	3.850.000.000,00	4.000.000.000,00	4.250.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.926.371.974,74	8.747.548.380,49	6.334.885.484,00	7.223.704.000,00	7.223.704.000,00
1.2.	Dana Perimbangan	441.546.437.641,00	492.972.415.505,00	524.722.830.108,00	541.357.964.000,25	575.581.538.250,27
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	68.055.716.641,00	71.815.797.505,00	60.376.974.108,00	60.376.974.000,00	60.376.974.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	339.309.471.000,00	383.325.898.000,00	424.351.636.000,00	442.980.990.000,25	476.204.564.250,27
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.181.250.000,00	37.830.720.000,00	39.994.220.000,00	38.000.000.000,00	39.000.000.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29.242.531.545,14	46.400.864.960,91	31.549.905.002,00	32.639.000.000,00	32.889.000.000,00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-



1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	12.664.472.831,14	17.632.969.355,91	18.249.905.002,00	11.250.000.000,00	11.500.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	12.174.768.000,00	15.628.306.000,00	-	16.139.000.000,00	16.139.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	9.649.758.100,00	8.300.000.000,00	-	-
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
1.3.7	Lain-lain pendapatan	4.403.290.714,00	3.489.831.505,00	5.000.000.000,00	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	485.070.270.187,37	557.821.638.555,66	573.988.201.414,00	592.858.692.999,75	628.727.971.000,69

**Tabel 3.2 REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012-2016**

No.	JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG	REALISASI (Rp)		PROYEKSI (Rp)		
		TAHUN	TAHUN	TAHUN BERJALAN	PAGU INDIKATIF	
		2012	2013		2014	TAHUN 2015
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	144.724.151.113,00	157.474.048.959,00	181.633.748.965,00	183.450.086.454,65	198.941.985.908,30
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-



2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	13.899.709.216,00	30.731.725.367,00	16.724.835.000,00	18.378.328.055,65	20.031.821.111,30
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.337.723.200,00	4.258.770.797,90	5.274.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.001,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25.487.432.648,10	25.609.581.639,54	28.047.098.000,00	29.863.435.489,65	31.679.772.979,30
2.1.8	Belanja Tak Terduga	64.156.000,00	0,00	1.344.545.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	25.373.573.495,00	31.246.989.251,00	36.317.138.988,00	37.406.653.157,64	38.528.852.752,37
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.394.094.379,00	104.366.678.579,00	154.254.831.076,00	159.004.218.372,28	163.896.087.287,45
2.2.3	Belanja Modal	159.723.543.350,00	179.256.638.700,67	177.161.260.651,00	182.476.098.470,53	186.610.269.960,65
	Total Jumlah Belanja	475.004.383.401,10	532.944.433.294,11	600.757.457.680,00	618.078.820.000,45	647.188.790.000,46
	SURPLUS/ (DEFISIT)	10.065.886.786,27	24.877.205.261,55	(26.769.256.266,00)	(25.220.127.000,70)	(18.460.818.999,76)



Tabel 3.2 REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 - 2016

No.	JENIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN	REALISASI (Rp)		PROYEKSI (Rp)		
		TAHUN	TAHUN	TAHUN	PAGU INDIKATIF	
		2012	2013	2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Penerimaan Pembiayaan	67.037.375.821,89	74.537.896.053,00	90.338.500.391,00	89.228.760.000 ,00	87.469.460.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	66.562.375.821,89	67.037.896.053,00	90.338.500.391,00	89.228.760.000 ,00	87.469.460.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	7.500.000.000,00	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	475.000.000,00	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.065.246.555,00	3.975.000.000 ,00	6.450.000.000,00	6.000.000.000,00	8.500.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.590.246.555,00	-	-	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.475.000.000,00	3.975.000.000,00	6.450.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto		56.972.129.053,16	70.562.896.053,00	83.888.500.391,00	83.228.760.000,00	78.969.460.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		67.038.016.053,16	95.440.101.314,55	57.119.244.125,00	58.008.632.999,00	60.508.641.000 ,00



